



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUSMIARTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 73671

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.106.680.230

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/154 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 432.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1336 m²/82.5 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 359.552.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 855 m²/144 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 470.277.358
4. Tanah Seluas 1029 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 84.378.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 683 m²/144 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 129.512.000
6. Tanah Seluas 3255 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 416.640.000
7. Tanah Seluas 230 m² di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 18.860.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m²/62.25 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 195.460.872

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 228.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	420.518.284
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.755.198.514
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.755.198.514

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.